



Buletin Parlementaria

Nomor 1223/I/XI/2022 • November 2022

Dukungan Legislasi Pada Transformasi Struktural Ekonomi Pasca Pandemi



3 Pemerintah
Diminta Fokus
Penyelamatan
Korban Bencana
Alam



4 Pertegas
Larangan
Penggunaan
Paracetamol
Untuk Anak



9 772614 339005



eMedia
DPR RI

Dukungan Legislasi pada Transformasi Struktural Ekonomi pasca Pandemi

Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menegaskan komitmennya dalam mendukung transformasi struktural ekonomi, khususnya pasca pandemi. Hal itu ditegaskan Kepala BK Setjen DPR RI Inosentius Samsul bahwa terkait persoalan ekonomi, DPR dan pemerintah terlibat secara penuh menuntaskan kebijakan agar terjadi pemulihan ekonomi.

Hal itu disampaikan Inosentius dalam acara Seminar Nasional 'Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Pembangunan Berkelanjutan di Tengah Tantangan Dinamika Global' di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/10).

"Kami dari BKD mendukung DPR, mulai dari pembahasan UU Ciptaker yang masih diikuti dinamikanya sampai sekarang. Karena lahir putusan MK yang menjelaskan bahwa prosedur penyusunan RUU tersebut inkonstitusional. Bahkan sampai saat ini saya masih menjalankan putusan MK tersebut di mana tiap Kamis dan Jumat melakukan konsultasi publik dalam rangka perbaikan UU Ciptaker," ujar pria yang kerap disapa Sensi tersebut.

Dukungan BK DPR RI dari sisi legislasi terhadap persoalan pemulihan ekonomi juga tercermin dalam perubahan Perppu Nomor 1/2020 menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Termasuk juga UU



Kepala BK Setjen DPR RI Inosentius Samsul saat acara Seminar Nasional di Ruang Abdul Muis.

Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan juga UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. "Sebenarnya banyak UU yang melibatkan BKD karena tugasnya menyiapkan Naskah Akademik dan RUU yang menjadi usul inisiatif termasuk RUU P2SK ini," tambah Sensi.

Karena itu, ia menjamin pembahasan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (P2SK) ini akan sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terkait meaningful participation. Yaitu, *right to be heard* (hak untuk

didengar), *right to be considered* (hak untuk dipertimbangkan), *right to be explained* (hak untuk dijelaskan).

"Nah ini memang dilema persoalan dalam menyusun kebijakan. Tapi, kita di BKD sudahantisipasi dan menyiapkan infrastruktur untuk memberi ruang meaningful participation tersebut, baik secara konvensional maupun digital berupa aplikasi. Jadi kalau ingin terlibat dalam penyusunan NA dan RUU, BKD telah menyiapkan online participation yang mencakup tiga hak itu," urainya. ● rdn/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



Pemerintah Diminta Fokus Penyelamatan Korban Bencana Alam



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani.

Sejumlah daerah diterjang bencana banjir dan longsor beberapa hari terakhir. Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meminta pemerintah untuk fokus terhadap penyelamatan korban dan memberikan bantuan kepada warga terdampak bencana.

"Atas nama pribadi dan pimpinan DPR, saya mengucapkan dukacita yang mendalam untuk para korban yang meninggal dunia serta yang mengalami luka-luka akibat bencana banjir dan longsor di beberapa wilayah di tanah air," kata Puan melalui rilis yang diterima **Parlementaria**, Selasa (18/10).

Sementara itu, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan terjadi rekor 76 bencana alam banjir hingga tanah longsor dalam sepekan terakhir. Tercatat total ada 13 orang meninggal dunia akibat bencana banjir hingga tanah longsor.

Adapun Beberapa wilayah yang diterpa banjir diantaranya Bogor, Bandung, Kabupaten Malang, Blitar, dan Banyuwangi, serta daerah luar Jawa seperti di Jembrana dan Karangasem, Bali. Longsor pun terjadi di Lombok, NTB. Banjir menyebabkan ratusan warga sempat terisolir di rumahnya.

Ada juga warga yang dilaporkan hilang akibat terseret arus banjir bandang. Infrastruktur seperti jalan dan jembatan dilaporkan rusak. "Pemerintah bersama stakeholder terkait, tim SAR harus fokus pada penyelamatan korban. Pastikan korban-korban yang hilang ditemukan," tegasnya. Puan juga mengingatkan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk segera menyalurkan bantuan kepada korban terdampak. • **rnm/aha**



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI
Rizka Arinindya, S.Sos, (Kasubag Media Cetak dan Website)
Suciati, S.Sos, (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos, (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Agung Hidayat, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Prima Danutirto, A.Md, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Ridwan Budiman, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destiantti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubald Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Virglanne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nasifa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firista Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER
Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geradi Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA
Supian, S.E, Natasya Amanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoyowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciaini, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eny Sulistiawati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Scan QR
untuk berita
selengkapny



Pertegas Larangan Penggunaan Paracetamol untuk Anak

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah untuk bersikap

tegas menyangkut larangan penggunaan obat paracetamol untuk anak. Sebab, dengan ketidaktegasan tersebut akan menimbulkan kesimpangsiuran dan berujung pada fitnah.

Terlebih, masyarakat akan dibuat bingung karena kebijakan yang abu-abu. "Pemerintah harus tegas mengambil sikap. Jangan di satu sisi mengimbau, tapi di sisi lain ada pernyataan dari Wamenkes bahwa paracetamol aman. Pilihannya hanya boleh atau tidak boleh, jika dianggap tidak boleh, maka buat

larangan segera bukan himbauan lagi. Jadi tidak abu-abu," kata Dasco dalam keterangan tertulisnya kepada **Parlementaria**, Kamis (20/10).

Menurut Dasco, setelah ada larangan tegas, pemerintah juga harus memberikan alternatif obat. Sebab paracetamol sudah menjadi kebutuhan pokok terhadap berbagai penyakit di keluarga. "Tentu ketika parasetamol tidak diperjuangkan sementara, lalu ada kebutuhan akan paracetamol, punya opsi lain," pintanya.

Oleh karena itu, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan, masyarakat tidak hanya diberikan pernyataan-pernyataan dari berbagai pihak, seperti dari kementerian, pejabat, organisasi dokter dan juga analisa-analisa pakar. Namun, dibutuhkan sebuah keputusan tegas, sambil menunggu penelitian berikan alternatif obat.

"Ketidaktegasan akan menimbulkan berbagai reaksi negatif dan fitnah. Maka putus segera, ya atau tidak, bukan himbauan apalagi perdebatan yang tidak perlu," tutupnya.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan telah melarang dokter dan tenaga kesehatan lainnya untuk meresepkan obat-obatan dalam bentuk cair atau sirup. Larangan ini merupakan bagian dari kewaspadaan di tengah melonjaknya kasus gagal ginjal akut yang banyak menyerang anak-anak di Indonesia. • **r dn/aha**



Wakil Ketua DPR RI
Sufmi Dasco Ahmad.

FOTO: IST/PDT

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Kunjungan Menteri Pendidikan Singapura, Bahas Peluang Kerjasama dengan Madrasah



FOTO: MGN/PDT

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat menerima kunjungan dari Menteri Pendidikan Singapura Chan Chun Sing di Gedung Nusantara III.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar menerima kunjungan dari Menteri Pendidikan Singapura Chan Chun Sing di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (18/10). Pada pertemuan tersebut sempat dibahas mengenai peluang kerjasama antara Indonesia dan Singapura di masa mendatang.

"Hari ini ada (kunjungan) Menteri Pendidikan dari Singapura ternyata mantan atase di Jakarta, mantan Menteri Perdagangan. Jadi sudah seperti saudara dan sudah paham betul kelebihan-kelebihan Indonesia dan paham betul tentang kelebihan-kelebihan Singapura. Tentu ini mempermudah kerjasama-kerjasama di masa yang akan datang," ujar politisi yang dikenal dengan sapaan Gus Muhaimin setelah pertemuan.

Kepada Parlementaria, Politisi PKB tersebut menjelaskan bahwa

kedepannya peluang kerjasama tak sebatas antar pemerintah, terlebih di bidang pendidikan (*government to government/ G2G*). Dijelaskannya sempat disinggung pula peluang kerjasama Pemerintah Singapura dengan sekolah dan madrasah yang ada di tanah air terutama terkait pengaplikasian teknologi.

"Tadi saya mengusulkan selain kerjasama G2G atau pemerintah ke pemerintah, kita berharap soal pendidikan ini juga kerjasama pemerintah ke masyarakat. Dalam artian kemajuan teknologi di Singapura bisa menjadi inspirasi atau pengungkit sekolah-sekolah, madrasah-madrasah di berbagai tempat di tanah air. Soal teknologi, soal skill kita pelajari nanti apa bisa kita adaptasikan," jelas Legislator

Dapil Jawa Timur VIII itu.

Turut hadir pada pertemuan tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Daniel Johan. Chan Chun Sing melakukan lawatan ke Indonesia dalam kapasitasnya sebagai presiden konsil organisasi menteri pendidikan di Asia Tenggara ('President of Southeast Asian Ministers of Education Organisation (SEAMEO) Council') dan direncanakan juga akan melakukan pertemuan dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. • uc.rnm/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



Dukung Pemfokusan PNS di Luar Jawa Demi Pembangunan Merata

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mendukung rencana pemerintah terkait pemfokusan penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang lolos CPNS di daerah luar Pulau Jawa. Politisi PDI-Perjuangan ini menilai harus ada pembenahan faktor kultural demi menghadirkan pembangunan yang tidak hanya berfokus di Pulau Jawa.

"Faktor kultural yang membuat PNS itu harus terus dekat dengan kediaman asal termasuk di Jawa itu harus dibenahi melalui regulasi yang ketat. Saya sepenuhnya sepakat dengan Menteri Azwar

”

DISTRIBUSI PNS ADALAH DISTRIBUSI SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS INDONESIA YANG SEHARUSNYA JUGA DINIKMATI OLEH DAERAH-DAERAH YANG ADA DI LUAR PULAU JAWA. (SEPERTI) MALUKU, PAPUA, TERMASUK KALIMANTAN.

Anas dalam konteks membangun Indonesia sentris maka kemudian penataan birokrasi termasuk formasinya juga harus kita arahkan," tutur Rifqi kepada awak media, Selasa (11/10).

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyebut pemerintah akan memfokuskan penempatan ASN dan PPPK yang lolos CPNS di daerah luar Pulau Jawa. Ini dikarenakan sejumlah daerah luar Pulau Jawa masih kekurangan tenaga dokter, bidan, dan guru.

Diketahui, formasi SDM di seluruh Indonesia, termasuk Maluku, Papua, dan Kalimantan, telah disiapkan dari tahun ke tahun. Namun, selang setahun menjalankan tugas banyak ASN yang pindah ke kota dan Jawa. Terkait hal tersebut, menurut Rifqi, selain formasi yang proporsional, pola mutasi PNS juga harus diperketat. Ia berharap ASN terdistribusi merata, dengan begitu daerah-daerah di luar Pulau Jawa juga kebagian ASN berkualitas.

"Distribusi PNS adalah distribusi sumber daya manusia berkualitas Indonesia yang seharusnya juga dinikmati oleh daerah-daerah yang ada di luar Pulau Jawa. (Seperti) Maluku, Papua, termasuk Kalimantan. Harus ada kesadaran sejak awal bagi calon PNS yang ingin mendaftarkan diri menjadi PNS atau ASN termasuk PPPK di dalamnya, bahwa mereka bekerja untuk Indonesia dan dimanapun ditempatkan tidak menjadi masalah," tutup legislator dapil Kalimantan Selatan I ini. ● we/aha



Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

FOTO: GERALDI/PDT



Legislator Minta Pj Gubernur DKI Jawab Tudingan Miring

Anggota
Komisi II
DPR RI
Guspardi
Gaus

meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, untuk menjawab berbagai tudingan miring yang dilontarkan kepadanya.

Menurutnya, penunjukan Pj tersebut dituding sarat muatan politis.

"Banyaknya tudingan dan nada miring dari kelompok masyarakat terhadap dirinya, perlu menjadi perhatian serius yang harus dibuktikan oleh Pak Heru Budi Hartono," ungkap Guspardi kepada awak media, Rabu (19/10). Dilanjutkannya, penunjukan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI dituding bukan berdasarkan faktor profesionalisme.

Terlebih lagi ia menilai, Heru Budi mempunyai rekam jejak yang kurang bersih, dan kerap bersinggungan dengan kasus korupsi di DKI Jakarta. Politisi Fraksi PAN ini menyebutkan dalam jejak digital terlihat nama Heru Budi Hartono pernah memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi pembelian tanah Cengkareng dan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras.

Dimana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan



Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus.

FOTO: ARIEF/PDT

kejanggalan berupa harga yang dinilai terlalu mahal dan merugikan negara dalam pembelian tanah tersebut. Bahkan Heru pun sempat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus reklamasi Pantai Jakarta pada 2016 silam.

"Banyak pihak merasa khawatir, PJ Gubernur DKI Jakarta itu akan mengubah berbagai kebijakan Anies Baswedan yang tidak sesuai dengan pemerintah pusat seperti reklamasi," ujarnya. Bahkan tidak sedikit pihak yang meragukan kemampuan Heru

”

**BANYAKNYA TUDINGAN
DAN NADA MIRING
DARI KELOMPOK
MASYARAKAT TERHADAP
DIRINYA**

Budi dalam menjaga netralitas aparat aparatur sipil negara (ASN) pada pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang.

Oleh karenanya, Guspardi minta Heru Budi untuk menjawab dan membuktikan berbagai tudingan yang dilontarkan kepadanya tersebut. Hal itu sekaligus untuk menjawab tudingan yang beredar, bahwa ia dipilih sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta karena faktor kedekatan dengan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo dan bukan berdasarkan profesionalisme.

Menurutnya, keraguan masyarakat Jakarta itu tentu akan mempengaruhi efektivitas kepemimpinan Heru Budi sebagai pengganti Anies yang dinilai banyak pihak berhasil memimpin Jakarta. "Dan itu harus mampu dijawab dan dibuktikan Pak Heru Budi Hartono," pungkasnya. ● **ayu/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir menilai para hakim yang berada di daerah

masih belum dalam batas kewajaran dalam mendapatkan kesejahteraan maupun keamanan. Pasalnya dalam pertemuan Komisi III dengan Pengadilan tinggi Sulawesi Selatan, Pengadilan Tinggi Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Pengadilan Militer mengemuka persoalan dimana para hakim di daerah hanya mendapatkan tunjangan pengganti rumah dinas yang tergolong kecil.

"Disinilah negara harus hadir agar bisa memberikan fasilitas untuk para hakim, negara harus bisa memberi fasilitas terhadap mereka baik itu tempat tinggal, maupun kendaraan, selain itu negara harus memberikan jaminan kesehatan maupun keamanan kepada hakim di seluruh Indonesia," kata Adies usai memimpin pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Syahril Sidik, beserta jajarannya di Kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, Selasa, (11/10).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan persoalan lain yaitu, terkait mobil dinas hakim militer yang sudah berusia dua puluh tahun dan sudah seharusnya di remajakan atau diganti oleh kendaraan dinas yang baru sesuai kebutuhan yakni 19 mobil untuk kebutuhan semua Pengadilan Militer yang ada di Indonesia.

"Saya rasa dengan anggaran Mahkamah Agung (MA) yang mencapai kurang lebih Rp11,8 triliun, seharusnya sudah bisa memberikan penggantian mobil dinas yang baru. Kami ingin Mahkamah Agung bisa bertanggung jawab terhadap hakim-hakim yang berada di bawah, dalam menjamin kesejahteraan. Baik bangunan tempat kerja maupun tempat tinggalnya perlu menjadi perhatian," pungkasnya.

Untuk itu, pihaknya mengingatkan, kesejahteraan

Legislator Minta MA Pastikan Kesejahteraan Hakim di Indonesia



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir saat pertemuan di Kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, Selasa, (11/10/2022).

”

KAMI INGIN MAHKAMAH AGUNG BISA BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP HAKIM-HAKIM YANG BERADA DI BAWAH, DALAM MENJAMIN KESEJAHTERAAN. BAIK BANGUNAN TEMPAT KERJA MAUPUN TEMPAT TINGGALNYA

hakim-hakim di daerah perlu menjadi perhatian MA. "Dan terakhir terkait pensuian para hakim yang sudah

mengabdikan puluhan tahun harus diberikan penghargaan sesuai masa kerjanya jangan sampai dikesampingkan tanggung jawab dan hak mereka. Dengan demikian terkait hal tersebut DPR akan kembali mengusulkan tentang RUU Jabatan Hakim," sebut Adies.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mengatakan bahwa negara harus hadir untuk kesejahteraan dan keamanan para hakim di seluruh Indonesia terutama di daerah-daerah. Guna menjaga harkat dan martabat keluhuran para hakim ini sebagai benteng terakhir dalam mencari keadilan baik dalam konteks *moral justice*, *social justice* dan *legal justice* memang harus dijaga sedemikian rupa. • rni/aha





Jangan Ada Lagi Basa-Basi untuk Bos Pengedar Narkoba

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al-Habsyi menegaskan agar tidak ada basa-basi dalam menghukum para gembong pengedar narkoba, serta semua putusan harus berdasarkan asas penegakan hukum. Ia juga mengharapkan pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba dapat lebih serius.

"Jika persoalan narkoba sudah berstatus darurat narkoba, saya minta kepada Kepala BNNP beserta Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) agar bisa lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan. Jika persoalan narkoba sudah ditingkat bos-bosnya pengedar lebih baik hukum mati saja, jangan basa-basi harus dipenjara," tekan Politisi Fraksi PKS itu usai pertemuan dengan Polda Sulsel bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi

(BNNP) Sulsel di Makassar, Rabu (12/10).

Ia pun, menilai permasalahan narkoba sebagai masalah klasik yang tidak pernah ada perubahan, seperti halnya di Provinsi Sulsel, angka kasus narkoba mengalami fluktuasi yang berujung pada kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. "Permasalahan darurat narkoba bukan hanya di Sulsel saja namun di seluruh Indonesia, jadi jangan lagi ada main-main terhadap persoalan ini, perlu pengawasan yang lebih ketat lagi. Jangan sampai BNN dan BNNP sudah ada, namun

permasalahan narkoba lebih banyak lagi, itu tidak benar kalau seperti itu," tegas Habib.

Tidak hanya persoalan narkoba, Habib pun, menyoroti kasus tindak pidana korupsi yang dinilai cukup serius. "Saya meminta Polda Sulsel agar lebih tajam lagi, lebih mengaktifkan badan tipikornya supaya temuan-temuan kerugian negara bisa lebih baik lagi, dan mencegah kerugian negara lebih besar," ungkap Legislator Dapil Kalimantan Selatan I ini.

Sementara Kapolda Sulsel Irjen Pol. Drs. Nana Sudjana menjelaskan bahawasanya Polda dengan BNNP sudah melakukan berbagai langkah-langkah dalam mengatasi darurat narkoba. "Saya sampaikan dalam pertemuan hari ini, dalam mengatasi darurat narkoba kita sepenuhnya melakukan perang terhadap narkoba, semua kekuatan diturunkan dan polda terus melakukan langkah-langkah dalam pemberantasan narkoba untuk pencegahan," ucapnya. • rni/aha



Anggota Komisi III DPR RI
Habib Aboe Bakar Al-Habsyi.

FOTO: RSB/PDT

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Kantor TNGL Pindah Guna Efektivitas Penanganan Isu Konservasi

Komisi IV DPR RI berharap adanya optimalisasi pelaksanaan program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pasca pemindahan Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser ke Banda Aceh. Harapan ini ditegaskan saat Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi mengunjungi Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menurut Dedi, pemindahan kantor ini menjadi bagian dari upaya dalam mendorong Balai Besar TNGL sebagai salah satu UPT Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk berperan lebih besar dalam penanganan isu-isu strategis perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati, khususnya di wilayah Provinsi Aceh.

"Pemindahan Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang semula berlokasi di Kota Medan, Sumatera Utara ke Kota Banda Aceh, Aceh merupakan tindak lanjut pada Rapat Kerja Komisi IV

DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 8 Juli 2020 atas usulan beberapa Anggota Komisi IV DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh," jelas Dedi saat memimpin rapat di Banda Aceh, Rabu (12/10).

Lebih lanjut pemindahan Kantor Balai Besar TNGL memiliki tujuan untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam rangka mendorong kerjasama dan dukungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Aceh. Tujuan akhirnya adalah agar masyarakat sekitar kawasan TNGL memiliki ekonomi berbasis kawasan konservasi, tumbuh dengan spirit keswadayaan, kemandirian, dan hidup berdampingan dengan satwa liar kebanggaan masyarakat Aceh, Indonesia, dan dunia.

Dalam kesempatan Kunjungan Kerja Reses kali ini, Komisi IV DPR RI telah menggali informasi mengenai Optimalisasi Pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasca Pemindahan Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dari Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara ke Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. ● **ssb/aha**



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DP RI di Banda Aceh, Rabu (12/10).

Komisi IV Apresiasi **Sistem Kerja** **Unit Pengolahan Ikan di Manado**



FOTO: PRIMA/PDT

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat kunjungan kerja Komisi IV DPR RI, ke Manado, Sulawesi Utara.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyampaikan apresiasinya terkait proses bisnis serta terobosan yang dilakukan oleh salah satu unit pengolahan ikan di Manado yakni Usaha Dagang (UD) Trikora. Menurut Sudin, meskipun masih menyandang status sebagai industri rumahan, tapi UD Trikora mampu memberikan pengemasan yang baik terhadap produk-produknya yang akan dipasarkan.

"Yang paling baik adalah UD Trikora ini berhasil memperoleh sertifikat 'Hazard Analysis and Critical Control Point' (HACCP), ini tidak

mudah karena sangat sulit untuk mendapatkan sertifikasi ini," ujar Sudin saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI, ke Manado, Sulawesi Utara, Selasa (11/10).

Selain memberikan apresiasi, dalam kunjungan tersebut politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga memberikan masukan mengenai infrastruktur dari UD Trikora salah satunya adalah lantai. Menurutnya penggunaan bahan dasar keramik sebagai lantai dapat memicu timbulnya bakteri. "Saya berharap lantai di UD Trikora ini tidak boleh keramik karena nat keramik dapat menyimpan bakteri dan virus maka rata rata menggunakan

semen biasa di epoksi dan setiap hari dibersihkan dengan air bersih," tuturnya.

Sudin menambahkan pihaknya berharap proses bisnis yang telah dijalankan oleh UD Trikora dapat lebih berkembang dengan bantuan dari pemerintah salah satunya bantuan peralatan. "Saya berharap Kementerian KKP dapat membantu usaha-usaha bagus seperti ini, tidak perlu sekaligus, tapi bisa bertahap, seperti alat-alat untuk mesin produksi dan lain sebagainya agar bisa lebih berkembang dan maju kedepannya," tutup Sudin. ● **pdt/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Sedia Payung Sebelum Hujan Demi Atasi Banjir Rob



FOTO: SAM/PDI

Anggota Komisi V DPR RI Sudewo saat Kunjungan Komisi V DPR RI ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Penanganan banjir rob, khususnya di Jawa Tengah harus diatasi secara menyeluruh. Sedia payung sebelum hujan tanpa harus menjadi tambal sulam adalah prinsip harus yang diyakini oleh setiap pemangku kepentingan untuk mengatasi banjir rob. Sehingga, pembangunan infrastruktur jangka pendek, menengah, maupun panjang harus diterapkan. Dimana, nantinya akan berdampak signifikan, khususnya untuk masyarakat pesisir.

Demikian pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi V DPR RI Sudewo usai memimpin Kunjungan Komisi V ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas di Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (10/10). Normalisasi

sungai, nilainya, menjadi salah satu agenda yang perlu disegerakan.

"Saat ini, Kementerian PUPR sekarang sedang dilakukan normalisasi sungai Loji 1, 2 dan 3. Itu adalah dalam rangka mengatasi rob juga. Adapun hal yang lain yang masih belum bisa tercover oleh Kementerian PUPR, saya akan dorong Direktorat Jenderal Sumber Daya Air supaya detail koordinasi dengan pemerintah provinsi," ucap Sudewo kepada **Parlementaria**.

Terakhir, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu meminta beberapa daerah di Jawa Tengah yang memiliki titik rawan banjir harus segera ditanggulangi. Baginya, penanggulangan di titik rawan tersebut jadi penting, mengingat masyarakat pesisir menggantungkan hidup di daerah tersebut.

"Menangani banjir rob menjadi prioritas bidang infrastruktur di

Provinsi Jawa Tengah ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kami harap masukan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar bisa berkoordinasi dan menindaklanjuti secara tepat," tandas Sudewo.

Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan sejumlah langkah demi menangani banjir rob, khususnya Provinsi Jawa Tengah. Sejumlah proyek infrastruktur sumber daya air (SDA) itu sedang diupayakan di Kota Semarang dan Pekalongan. Khusus di Kota Semarang, penanganan banjir rob tahap I telah dilakukan sejak tahun 2016-2019, berupa tanggul laut hingga rumah pompa. Kini, proyek penanganan banjir rob telah masuk tahap II, salah satunya berupa tanggul laut sepanjang 2 kilometer. • **ts/aha**



Soroti Program Padat Karya **Proyek Revitalisasi Stasiun Padalarang**

Anggota Komisi V DPR RI Anang Susanto menyoroti program padat karya dalam pembangunan prasarana perkeretaapian mendukung konektivitas Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Stasiun

Padalarang. Dimana penyediaan prasarana untuk 'feeder' atau pengumpan Kereta Api Padalarang-Bandung merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN)..

"Saya ingin menyoroti terkait keterlibatan orang-orang setempat, soal padat karya. Apalagi proyek disini ada tiga investor dengan

pengerjaan yang berbeda, saya telah mewanti-wanti jangan sekali-kali melibatkan pekerja dari luar sementara warga sekitar tidak kebagian apa-apa," ujar Anang saat mengikuti Tim Kunker Komisi V DPR meninjau progres revitalisasi Stasiun Padalarang beserta perangkat lainnya di Bandung Barat, Jabar, Selasa (11/10).

Legislator Dapil Jawa Barat II ini mengingatkan, terkait program padat karya ini, seringkali bertolak belakang dari pemaparan saat rapat yang dipaparkan akan selalu melibatkan warga setempat. Tapi pada kenyataannya masyarakat setempat justru kurang dilibatkan.

"Untuk itu saya ingatkan sekali lagi bahwa utamakanlah keterlibatan dari warga setempat, sehingga bukan cuma menjadi penonton tapi benar-bener penikmat juga. Masyarakat harus dibantu juga supaya kualitas hidupnya meningkat, bersamaan juga dengan terbangunnya proyek kereta api ini," pungkas Anang.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini berharap, agar proyek Kereta Cepat tersebut dapat segera terealisasi, karena pasti akan sangat membantu sekali terutama untuk Kabupaten Bandung yang sering mengalami kemacetan. Ia membayangkan, dengan kecepatan akses Bandung ke Jakarta itu akan memudahkan lalu lintas orang di kedua kota tersebut.

"Mungkin dengan adanya kereta api cepat Jakarta Bandung itu sepertinya saya ngantor tidak harus menetap di Jakarta, mungkin bisa dari Bandung karena bisa menaiki kereta cepat yang bisa memangkas jarak tempuh sekitar 45 menit saja. Sekali lagi saya tekankan masalah padat karya saja, kalau teknis bapak-bapak lebih hebat, tapi yang jelas program padat karyanya yang kadang-kadang tidak sesuai dengan yang diucapkan," ungkap Anang. ● **jk/aha**

Anggota Komisi V DPR RI
Anang Susanto.

FOTO: JKA/PDT

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Kopi Indonesia Harus Merajai Pasar Lokal

Kopi produk negeri sendiri idealnya memang merajai pasar dalam negeri. Dari mulai pasar biji kopi sampai kedai kopi, harus dikuasai produk Indonesia. Kopi impor dan kedai kopi asing harus diminimalisir, bahkan kalau bisa ditiadakan di dalam negeri.

Demikian mengemuka dalam pertemuan delegasi Komisi VII DPR RI dengan direksi PT Santos Jaya Abadi yang memproduksi kopi Kapal Api, di Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (17/10). Anggota

Komisi VII DPR Tifatul Sembiring yang memimpin pertemuan ini mengatakan, saat ini sedang menjamur kedai kopi atau *coffee shop* di dalam negeri. Sebagian dari

kedai kopi itu menggunakan brand asing.

Pemerintah, kata Tifatul, harus memberdayakan para petani lokal dengan memberi pendampingan, agar kualitas dan kuantitasnya semakin baik. Ini penting untuk mengurangi impor dan bahkan kedai kopi asing. Impor harus dikurangi, terutama dari Brazil. "Kalau bisa kopi Brazil itu tidak ada di sini. Jadi intinya sekarang bagaimana konsumen kopi meningkat di Indonesia. Jangan ada Starbucks, Maxx Coffee, dan brand asing yang banyak bertebaran. Kita berharap Indonesia memiliki brand sendiri," harapnya.

Peminat kopi, lanjut Politisi PKS ini, kini sedang melejit angkanya di Tanah Air. Ini harus diimbangi peningkatan produksi kopi di dalam negeri. Lahan perkebunan dan tanaman kopi harus dilakukan peremajaan untuk memenuhi kebutuhan pasar kopi domestik, bahkan dunia. Tinggal sekarang bagaimana mengelola perkebunan kopinya. Kopi asli Indonesia sangat dikenal dunia. Dan Kapal Api telah mengambil sebagian pasar ekspor kopi nusantara itu. • mh/aha

”

**HARUS
MEMBERDAYAKAN
PARA PETANI LOKAL
DENGAN MEMBERI
PENDAMPINGAN,
AGAR KUALITAS DAN
KUANTITASNYA
SEMAKIN BAIK**

FOTO: HUSEN/PDT



Anggota Komisi VII DPR Tifatul Sembiring saat diwawancarai usai pertemuan delegasi Komisi VII DPR RI dengan direksi PT Santos Jaya Abadi yang memproduksi kopi Kapal Api, di Sidoarjo.

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Produsen Minuman Teh Indonesia Diharapkan Dapat Mendunia



FOTO: OJI/PDT

Anggota Komisi VII DPR RI Marwan Jafar saat mengikuti Kunjungan Kerja ke salah satu Pabrik Teh Botol Sosro di Gianyar, Bali.

Anggota Komisi VII DPR RI Marwan Jafar berharap produk minuman teh Indonesia asal Slawi Jawa Tengah yang terkenal dengan brand Teh Botol Sosro bisa menjadi produk nasional yang mendunia. Hal tersebut diungkapkannya saat meninjau salah satu Pabrik Teh Botol Sosro di Gianyar, Bali, Rabu (19/10).

"Salah satu caranya untuk mendunia adalah misalnya dengan menjadikan Teh Botol Sosro sebagai minuman resmi dalam perhelatan G20 di Bali yang akan diselenggarakan pada November tahun ini," usul Marwan saat pertemuan dengan Direksi PT Sinar Sosro yang juga dihadiri Staf Ahli Industri Agro Kementerian Perindustrian serta Perwakilan Dinas

Perindustrian Provinsi Bali.

Sebagai industri minuman yang berawal dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan kini telah berkembang dan memiliki 12 pabrik tersebar di seluruh Indonesia, lanjut Marwan maka sudah selayaknya teh botol Sosro berani tampil sebagai produk nasional yang original dan mendunia.

"Dari data pemerintah, pada periode Januari hingga Juni 2022, ekspor industri makanan dan minuman mencapai USD21,3 miliar, meningkat 9% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 sebesar USD19,5 miliar. Industri makanan dan minuman mampu menarik investasi sebesar Rp21,9 triliun hingga kuartal II tahun 2022 dan menyerap tenaga

kerja hingga 1,1 juta orang," imbuh Politisi Fraksi PKB ini.

Namun demikian, Legislator Dapil Jawa Tengah III ini juga mendorong agar PT Sinar Sosro mengedepankan penggunaan bahan baku gula lokal (sukrosa) ketimbang impor dalam proses produksinya. "Penggunaan gula lokal akan mengurangi ketergantungan impor sekaligus meningkatkan

produktivitas petani tebu kita. Dan tak kalah pentingnya peran CSR (*corporate social responsibility*) juga sejauh ini bagi komitmen pengembangan UMKM sekitar," tutup Marwan yang juga mantan Kemendes ini.

Perwakilan PT Sinar Sosro, Sabrina Kharisanti mengemukakan perusahaannya memiliki sebuah visi 'The Indonesian World Class Beverage Company' yakni untuk menjadi perusahaan minuman kelas dunia, yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen, kapan saja, dimana saja, serta memberikan nilai tambah untuk semua pihak terkait. "Dengan inovasi secara terus menerus, PT Sinar Sosro diharapkan bisa menjadi penopang industri makanan dan minuman di Indonesia," tandasnya. ● **oji/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



STAIN SAR Didorong Bermetamorfosis Wujudkan Kampus Islami Taraf Internasional

Wakil Ketua Komisi VIII DPR TB Aceh Hasan Syadzily mendorong Kampus

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman (STAIN SAR) Kepulauan Riau agar bermetamorfosis menjadi kampus Islami bertaraf Internasional yang menjadi kebanggaan masyarakat Kepulauan Riau (Kepri). Sebagaimana diketahui, penyelenggaraan Pendidikan Tinggi khususnya Pendidikan Tinggi Islam adalah bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional, yang merupakan amanat dari Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Berlangsung sejak tahun 2018, kami juga sangat mendukung proses perubahan STAIN SAR ini menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan bahkan ke depan harus bisa menjadi Universitas Islam Negeri," jelas Ace dalam sambutannya saat melakukan peninjauan ke STAIN SAR, Kepri, Selasa (11/10).

Mengutamakan basis ilmu pengetahuan, Politisi partai Golkar itu mengungkapkan Pendidikan Tinggi Keagamaan diharapkan mampu menjalankan peran strategis untuk memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Tidak hanya peran strategis, akan tetapi juga menjadi benteng moral umat dan bangsa. Saat ini, ungkapnya, Perguruan Tinggi Islam berlomba



FOTO: TIARA/PDI

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR TB saat foto bersama usai melakukan peninjauan ke STAIN SAR, Kepri.

menjadi perguruan tinggi berkelas dunia. Di mana, ia berharap setiap kampus bisa bersaing dengan kampus-kampus level dunia sekaligus melahirkan lulusan yang bersaing dengan negara-negara maju.

"Dalam mewujudkan *world class university*, universitas yang mempunyai reputasi akademik yang mapan dan juga didukung oleh sumberdaya akademik yang mumpuni serta tangguh. Paradigma tersebut muncul karena melihat beberapa kenyataan saat ini dan akibat dari globalisasi dalam berbagai sendi kehidupan manusia. Globalisasi tidak semata-mata mempengaruhi sistem pasar, tetapi juga dalam sistem pendidikan," tandas Ace.

Pada kesempatan yang sama Ketua STAIN SAR Muhammad Faisal menyampaikan aspirasi STAIN SAR Kepri kedepannya agar dapat menjadi salah satu pertimbangan alih status STAIN menjadi IAIN yang nantinya dibawa oleh Komisi VIII DPR RI untuk dirapatkan bersama Menteri Agama RI di Jakarta. "STAIN SAR Kepri memiliki visi unggul, keislaman, dan kemelayuan ini menjadi dasar pengembangan keilmuan islam di tanah melayu, bumi segantang lada Kepulauan Riau. Oleh karenanya Kami berharap Komisi VIII DPR RI dapat membawa aspirasi ini berupa alih status STAIN menjadi IAIN nanti di Jakarta," harapnya. ● tra/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



Komisi VIII Apresiasi Penyelenggaraan Haji di Maluku

Komisi VIII DPR RI mengapresiasi penyelenggara Ibadah Haji Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi di Maluku. Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi yang memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII ke Ambon, Maluku, Senin (10/10) mengatakan secara umum penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi di Maluku sudah berjalan dengan baik.

"Secara umum, saya memantau dan melihat melalui media bahwa alhamdulillah, pelaksanaan haji tahun ini relatif hampir tidak ada keluhan dari masyarakat, bahkan sebagian masyarakat mengatakan ini ONH biasa terasa ONH plus. Mungkin karena jumlah jemaah haji yang berangkat kemarin kuantanya hanya kurang lebih 100 ribu orang, jadi kurang lebih 50 persen berkurang (dari jumlah jemaah sebelum pandemi)," jelasnya.

Meski dinilai sudah berjalan dengan baik, Ashabul Kahfi mengingatkan agar jajaran kementerian/lembaga penyelenggara Ibadah Haji terkait tidak lantas berpuas diri. Sebab, setelah dievaluasi, masih ditemukan beberapa hal yang masih membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan kedepannya.

Beberapa hal yang perlu diperbaiki tersebut, antara lain, terkait dengan kenaikan biaya-biaya dalam ibadah Haji, sehingga menyebabkan Pemerintah Indonesia harus memberikan subsidi dalam jumlah yang tidak sedikit, yakni sebesar Rp1,5 triliun. Untuk itu, pihaknya berharap Pemerintah

Indonesia dapat melakukan negosiasi-negosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi untuk dapat menekan biaya tersebut.

Terkait pendamping jemaah Haji, politisi PAN tersebut menekankan agar kedepannya rekrutmen pendamping jemaah haji tersebut dapat dilakukan dengan lebih selektif. Mengenai kuota Haji Furoda, Ashabul menilai perlu adanya ketegasan terhadap pihak travel terkait perizinan dan biaya yang harus dibayarkan.

Menurutnya, pemerintah harus dapat memanfaatkan kuota Haji tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi. "Tapi karena ini

(penambahan kuota Haji) tidak ada payung hukumnya sehingga ya kita kembalikan juga ke Kementerian Agama, kalau mau ambil resiko. Sehingga mungkin dalam undang-undang yang baru, itu perlu menjadi salah satu perhatian, sehingga kuota tambahan yang baru tidak menjadi sia-sia," jelasnya.

Terakhir, tentang masa tunggu ibadah Haji, Politisi Fraksi PAN itu menyarankan stakeholder terkait untuk aktif bernegosiasi dengan negara lain yang memiliki kuota yang tidak dipakai. Harapannya, kuota tersebut bisa digunakan jemaah Indonesia. • **bia/aha**

Ketua Komisi VIII
Ashabul Kahfi.



FOTO: BIA/PDT

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Perlunya Sosialisasi Masif Pengobatan Tanpa Obat Sirup

Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan himbauan untuk menghentikan konsumsi obat cair/sirup terutama untuk pengobatan anak. Hal ini dilakukan terkait dengan dugaan adanya zat yang dapat memicu Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal/*Acute Kidney Injury* (AKI) pada anak.

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mendukung langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan pemerintah dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran kasus gagal ginjal akut misterius yang menyerang pada anak.

"Kondisi ini memang memprihatinkan. Kita mendapat ujian lagi, penyakit gagal ginjal akut misterius ini belum diketahui penyebabnya secara pasti. Sementara itu kasus bertambah terus dan sudah banyak anak-anak kita yang meninggal. Menyikapi keadaan ini, parlemen mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang dilakukan pemerintah," kata Rahmad Handoyo melalui keterangan resmi yang diterima

Parlementaria, Kamis (20/10).

Anggota Legislatif Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, pihaknya juga setuju dan mendukung penuh langkah pemerintah yang mengeluarkan surat edaran penghentian

untuk sementara penggunaan penggunaan obat-obatan berbentuk sirup atau cairan. Hal ini disebabkan adanya dugaan kandungan etilen glikol (EG) pada jenis obat-obatan tersebut yang disinyalir bisa merusak ginjal.

"Larangan penggunaan obat sirup atau cair sebagai antisipasi penyakit gagal ginjal akut pada anak ini harus jadi perhatian semua pihak. Tak hanya para orang tua, tapi apotek dan puskesmas, semua harus menghentikan sementara

penjualan dan penggunaan obat cair tersebut," kata Legislator Dapil Jawa Tengah V itu.

Masih terkait dengan penghentian penggunaan obat sirup, menurut Handoyo, tidak cukup hanya sebatas larangan pengumuman saja tetapi harus disosialisasikan secara masif kepada publik. Secara terus menerus agar informasi ini benar benar sampai ke masyarakat dan siapapun yang menjual obat-obatnya.

"Tentang hal ini (larangan penggunaan obat cair) masyarakat harus diedukasi secara masif dan optimal.

Pemerintah kan bisa memanfaatkan berbagai strategi komunikasi maupun memanfaatkan platform media yang ada," kata Handoyo. ●
uc/aha



Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo.

FOTO: MUN/PDT

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



BPOM Diminta **Tindak Lanjut** Pelarangan Penjualan Obat Mengandung DEG dan EG

Anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam meminta BPOM menindaklanjuti pelarangan penjualan obat yang mengandung dietilen glikol (DEG) dan etilen glikol (EG). Dua Zat ini disinyalir menjadi salah satu pemicu meledaknya kasus gagal ginjal akut pada anak yang terjadi di Indonesia beberapa waktu ini.

"BPOM memberikan himbauan atau larangan obat batuk sirup pada anak atau dewasa yang mengandung dietilen glikol dan etilen glikol supaya dihentikan

penjualannya. Bagi kita karena fungsi dan tugas daripada BPOM memang melakukan pengawasan dan terdiri daripada orang-orang yang ahli, itu kita ikuti apa yang disampaikan oleh BPOM," ujarnya.

Melalui sambungan telepon pada Rabu (19/10/2022), Legislator Dapil Sumatera Barat I ini mengatakan sebaiknya BPOM menarik obat-obatan yang mengandung dua zat berbahaya tersebut. Menurutnya, himbauan ini akan lebih efektif jika diikuti dengan aksi penarikan obat tersebut masih beredar di masyarakat.

"Kita minta, kalau BPOM sudah melarang dan menganjurkan, harusnya BPOM menarik obat-obat

itu yang beredar di masyarakat. Harus ditarik. Karena, kalau melarang saja, *enggak* ada gunanya," kata Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Mantan Ketua IDI Cabang Payakumbuh ini juga meminta BPOM menjelaskan kepada masyarakat secara masif tentang peredaran obat-obatan yang mengandung DEG dan EG. Dirinya menjelaskan informasi ini juga dinilai vital bagi masyarakat yang ingin membeli obat dari luar negeri secara online.

"Kalau sudah ada beredar di Indonesia ya ditarik. Nah, kalau belum beredar, umpamanya, ya dilarang masuk ke Indonesia. Masyarakat diinformasikan juga bahwa obat batuk yang ada zat berbahaya itu belum masuk ke Indonesia dan masyarakat (untuk hati-hati), misal beli obat secara online," jelas Suir Syam.

Dilansir dari situs BPOM, sirup obat untuk anak yang disebutkan dalam informasi dari WHO yaitu Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup, dan Magrip N Cold Syrup tidak terdaftar di Indonesia. Demi melindungi masyarakat, BPOM telah menetapkan regulasi berupa persyaratan registrasi yang berisi semua produk obat sirup untuk anak maupun dewasa, tidak diperbolehkan menggunakan dietilen glikol (DEG) dan etilen glikol (EG). • **uc/aha**

Anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam.



FOTO: MUN/PDT



Scan QR untuk berita selengkapnya

Proses Demokrasi Indonesia Dipengaruhi oleh Kesadaran Politik Pemuda

"Karena mereka ini memang orang-orang terbaik. Kami juga berharap tentunya Parlemen kedepan akan berkualitas dengan masuknya orang-orang yang berkualitas dari kalangan generasi muda," harap politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Terkait substansi yang sedang dibahas dan menjadi tema Parja 2022 ini, yaitu Generasi Sadar Privasi, Dataku Tanggung Jawabku, Hetifah

berpandangan bahwasanya banyak sekali perspektif baru yang sama sekali berbeda dengan yang ia ketahui selama ini. Karena memang dua per tiga pengguna internet aktif adalah anak muda.

"Tentu saja mereka termasuk kelompok yang data pribadinya rentan disalahgunakan. Oleh sebab itu, kesadaran akan pentingnya melindungi secara pribadi data-data itu," tutur Hetifah. Menurut Hetifah, yang tidak kalah pentingnya bagaimana

pemerintah bersama DPR turun tangan dengan membuat suatu kebijakan atau membuat suatu undang-undang. Dimana regulasi tersebut bisa menjamin atau memastikan hak-hak masyarakat termasuk kaum muda terkait perlindungan data pribadi ini.

"Jadi ini isu yang sangat tepat, karena memang kita baru saja menyetujui Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Ini juga terkait dengan kehidupan mereka, karena memang mereka generasi yang sangat rentan bergantung pada teknologi digital," pungkasnya. ● **es/aha**



FOTO: MAN/PDT

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat membuka secara resmi Parlemen Remaja 2022, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, proses demokrasi di Indonesia kedepannya sangat dipengaruhi oleh kesadaran politik generasi muda. Apalagi, Indonesia digadang-gadang akan mendapatkan bonus demografi yang harus disambut dengan secara matang.

Hal ini disampaikan Hetifah saat membuka secara resmi Parlemen Remaja 2022, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis

(13/10). "Jadi, ini adalah suatu kesempatan bagi mereka untuk melihat langsung, merasakan dan tentu saja mereka akan menjadi duta-duta bagi daerahnya," terang Hetifah.

Di daerah masing-masing, ujar Hetifah, para Anggota Parja bisa menyosialisasikan tentang proses politik di DPR RI seperti pengambilan keputusan maupun kebijakan yang sangat kompleks. Yang pasti, menurut Hetifah, keterampilan dan pengalaman didapatkan selama menjadi Anggota Parja bisa menjadi sugesti positif dan memotivasi mereka untuk terjun ke dunia politik.



Dukung Penuh Transformasi Pertemuan AIPA Menjadi Panitia Sidang Umum AIPA

Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Ravindra Airlangga mendukung penuh transformasi pertemuan Anggota Muda Parlemen AIPA menjadi Panitia Sidang Umum AIPA. Hal ini menunjukkan bahwa Parlemen ASEAN berkomitmen untuk masa depan kawasan.

"Kami berpandangan bahwa transformasi ini penting karena menunjukkan bahwa parlemen di ASEAN berkomitmen untuk masa depan kawasan, dengan menciptakan representasi politik yang formal dan lebih inklusif dari rakyat ASEAN, terutama kaum muda," sebutnya di Ruang Delegasi BKSAP DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/10). Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengingat jumlah pemuda sekitar 213 juta (15-34 tahun) di negara-negara ASEAN, jumlah yang sangat signifikan untuk diwakili secara formal dalam forum parlemen.

"Yang terpenting, transformasi juga akan menjadi isyarat politik positif untuk mempromosikan

Komunitas ASEAN yang benar-benar berorientasi pada rakyat dan berpusat pada rakyat. Hal ini juga akan memberikan kesempatan yang baik bagi partisipasi dan peran pemuda yang lebih besar dalam mewujudkan integrasi ASEAN," imbuhnya.

Selanjutnya, memiliki komite Parlemen Muda di AIPA merupakan nilai tambah bagi organisasi. Dengan wawasan dan pemikiran yang lebih segar, Anggota Parlemen Muda dapat memainkan peran penting

dalam membentuk kebijakan yang lebih inklusif dan mengawasi keuangan publik pemerintah untuk menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan tahan terhadap dinamika global.

"Agenda 2030 untuk *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya target SDGs 16.7 juga menggarisbawahi perlunya memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di semua tingkatan," sebut Ravindra. • **tn/aha**



Anggota BKSAP DPR RI
Ravindra Airlangga.

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO: RSB/PDT



FOTO: DEP/PTD

Ketua Korps Pegawai Negeri (Korpri) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Djaka Dwi Winarko saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Baiturrahman, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/9).

Maulid Nabi Momentum Kembali Mengingat Teladan Rasulullah SAW

Ketua Korps Pegawai Negeri (Korpri) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Djaka Dwi Winarko mengungkapkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hendaknya dijadikan momentum untuk kembali mengingat tauladan Rasulullah di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam dunia kerja. Untuk itu bekerja sama dengan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM)

Baiturrahman, Korpri Setjen DPR melakukan kegiatan peringatan Maulid tersebut.

"Alhamdulillah pada hari ini kita, Korpri Setjen DPR dan DKM Baiturrahman melakukan kegiatan rutin peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Disini hendaknya dijadikan momentum untuk kembali mengingat teladan perilaku Rasulullah di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam dunia kerja," ungkap Djaka usai peringatan

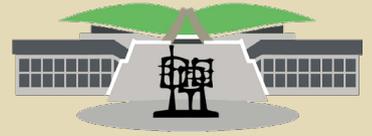
Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Baiturrahman, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/9).

Perjalanan Nabi dari lahir hingga wafat, lanjut Djaka, seluruhnya bisa dijadikan pelajaran yang bisa diterapkan di berbagai bidang kehidupan, dari kehidupan sosial, kehidupan keluarga dan juga kehidupan di lingkungan pekerjaan dengan meningkatkan etos kerja para PNS dan pegawai Setjen DPR RI lainnya. "Sehingga hal ini bisa menjadi semacam motivasi kita untuk bagaimana kita selalu menjadi lebih baik lagi," katanya.

Dalam kesempatan itu Korpri dan DKM Baiturrahman juga memberikan santunan kepada yatim piatu yang notabene merupakan keluarga di lingkungan setjen DPR RI. Djaka berharap ke depan Baiturrahman dan Korpri bisa melakukan hal serupa dengan lingkungan yang lebih luas lagi, di luar keluarga Setjen DPR RI. ● **ayu/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya





Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI melakukan pertemuan dengan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Muhammad Haryo Yuniarto dan jajarannya di Seminyak, Provinsi Bali. FOTO:OJJ/PDT



Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke RS Hermina Medan, Sumatera Utara. FOTO:UBAID/PDT



Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Sumariyandono saat melantik Susriyanto sebagai Pejabat Fungsional Auditor Ahli Muda Inspektorat II di Ruang Pansus C, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. FOTO:JKA/PDT

